

**PENGARUH PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH DAN PEMANFAATAN
TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP NILAI INFORMASI
PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Padang)**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



Oleh :

**DEWI PEBRIYANI
2008/02146**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2012**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kota Padang)

Nama : DEWI PEBRIYANI

NIM/BP : 02146/2008

Program Studi : Akuntansi

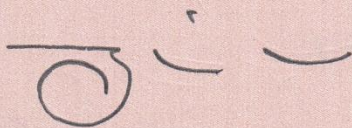
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik

Fakultas : Ekonomi

Padang, Juli 2012

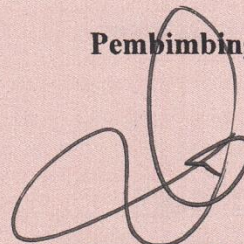
Disetujui Oleh:

Pembimbing 1



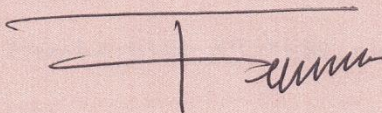
Dr. H. Efrizal Syofyan, SE, M.Si, Ak
NIP. 19580519 199001 1 001

Pembimbing 2



Deviani, SE, M.Si, Ak
NIP. 19690610 199802 2 001

Mengetahui
Ketua Program Studi Akuntansi



Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak
NIP. 19730213 199903 1 003

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang

Judul : Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang).

Nama : Dewi Pebriyani

Nim/Bp : 02146/2008

Program Studi : Akuntansi

Keahlian : Akuntansi Sektor Publik

Fakultas : Ekonomi

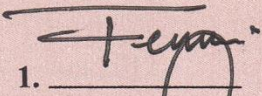
Padang, 17 Juli 2012

Tim Penguji

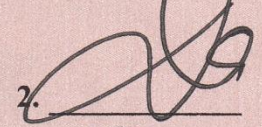
No. Jabatan Nama

Tanda Tangan

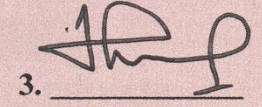
1. Ketua : Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak

1. 

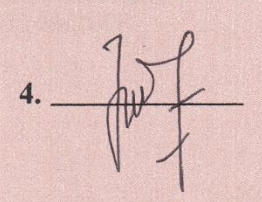
2. Sekretaris : Deviani, SE, M.Si, Ak

2. 

3. Anggota : Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak

3. 

4. Anggota : Lili Anita, SE, M.Si, Ak

4. 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DEWI PEBRIYANI
NIM/Thn. Masuk : 02146/2008
Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta/05 Februari 1990
Program : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jl. Garuda Induk no.64 Perumnas ATB, Padang
No. HP/Telepon : 085263655868
Judul Skripsi : Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (*Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang*)

dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis (skripsi) saya ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana), baik di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan pemikiran saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah ditandatangani Asli oleh Tim Pembimbing, Tim Penguji dan Ketua Program Studi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima **Sanksi Akademik** berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, Juli 2012

Yang menyatakan,



DEWI PEBRIYANI

NIM. 02146/2008

ABSTRAK

Dewi Pebriyani (02146) : Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kota Padang). Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang, 2012.

**Pembimbing : 1. Dr. H. Efrizal Syofyan, SE, M.Si, Ak.
2. Deviani, SE, M.Si, Ak.**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji: 1) Pengaruh pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. 2) Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Jenis penelitian ini digolongkan pada penelitian yang bersifat kausatif. Populasi dalam penelitian ini adalah SKPD di Kota Padang. Pemilihan sampel dengan metode *total sampling*. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer. Teknik pengumpulan data dengan teknik survei dengan kuesioner. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa: 1) Pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah, dimana nilai signifikansi $0,009 < 0,05$ dan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,655 > 1,6591$ (H_1 diterima). 2) Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan positif terhadap terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah, dimana nilai signifikansi $0,037 < 0,05$ dan $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,112 > 1,6591$ (H_2 diterima)

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan bagi 1) seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Padang agar dapat meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan bagi inspektorat lebih memperketat pengawasan keuangan daerah. 2) Bagi penelitian selanjutnya hendaknya menggunakan teknik pengumpulan data dengan teknik survei dan wawancara langsung terhadap responden untuk dapat menggali semua hal yang menjadi tujuan penelitian, dan pergantian sampel penelitian, serta dilakukan perubahan dalam pemilihan alternatif jawaban pada kuesioner penelitian.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar sarjana ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih terutama kepada Bapak Dr. H. Efrizal Syofyan, SE, M.Si, Ak sebagai pembimbing I dan Ibu Deviani, SE, M.Si, Ak sebagai pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan tenaga untuk membimbing penulis selama ini. Selain itu, tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
4. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha dan Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah membantu dalam kelancaran Administrasi dan perolehan buku-buku penunjang skripsi.

5. Orang Tua yang selalu ada dihati, adik sematawayang dan seluruh keluarga besar penulis atas kasih sayang dan bantuan moril maupun materil.
6. Teman-teman di Fakultas Ekonomi yang banyak memberikan saran, bantuan dan dorongan dalam penyusunan skripsi ini, terutama teman-teman Program Studi Akuntansi Angkatan 2008.
7. Dan semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis mohon maaf bilamana ada kesalahan ataupun kekurangan-kekurangan dalam penyusunan skripsi ini yang tidak penulis sadari. Semoga penelitian berikutnya akan menjadi lebih baik lagi. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini mempunyai arti dan dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca. Amin.

Padang, September 2012

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	11
C. Pembatasan Masalah	11
D. Perumusan Masalah	11
E. Tujuan Penelitian	11
F. Manfaat Penelitian	12
BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS	13
A. Kajian Teori	13
1. Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	13
2. Pengawasan Keuangan Daerah	25
3. Pemanfaatan Teknologi Informasi.....	34

4. Penelitian Relevan	39
B. Pengembangan Hipotesis	40
C. Kerangka Konseptual	43
D. Hipotesis Penelitian	44
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Jenis Penelitian	45
B. Populasi, Sampel, dan Responden	45
C. Jenis Dan Sumber Data	48
D. Teknik Pengumpulan Data	48
E. Variabel Penelitian	49
F. Pengukuran Variabel	49
G. Instrumen Penelitian	50
H. Uji Validitas Dan Reliabilitas	52
I. Hasil Uji Coba Instrumen	53
J. Uji Asumsi Klasik	55
K. Teknik Analisis Data	56
L. Definisi Operasional	59
BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	61
A. Sampel dan Responden Penelitian	61
B. Analisis Deskriptif	62
C. Uji Validitas dan Reliabilitas Penelitian	73
D. Hasil Uji Asumsi Klasik	74

E. Uji Model	77
F. Pembahasan	82
BAB V PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Keterbatasan	85
C. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA.....	88
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1	Daftar Instansi Pemerintahan Daerah Kota Padang..... 46
Tabel 2	Daftar Skor Jawaban Pernyataan..... 50
Tabel 3	Kisi-kisi Instumen Penelitian..... 51
Tabel 4	Hasil Uji Coba Instrumen..... 54
Tabel 5	Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner 61
Tabel 6	Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 62
Tabel 7	Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir 63
Tabel 8	Jumlah Responden Berdasarkan Keahlian Pendidikan 64
Tabel 9	Jumlah Responden Berdasarkan Masa Kerja 65
Tabel 10	Statistik Deskriptif..... 66
Tabel 11	Distribusi Frekuensi Variabel Nilai Informasi..... 67
Tabel 12	Distribusi Frekuensi Variabel Pengawasan Keuangan Daerah..... 70
Tabel 13	Distribusi Frekuensi VariabelPemanfaatan Teknologi Informasi... 71
Tabel 14	Uji Validitas..... 73
Tabel 15	Uji Reliabilitas..... 74
Tabel 16	Uji Normalitas..... 75
Tabel 17	Uji Multikolinearitas..... 76
Tabel 18	Uji Heterokedastisitas 77
Tabel 19	Adjusted R Square 78

Tabel 20	Koefisien Regresi Berganda	78
Tabel 21	Uji F Hitung.....	80

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Kerangka Konseptual.....	43

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Kuesioner Penelitian.....	91
2. Tabulasi Pilot Test.....	96
3. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas <i>Pilot Test</i>	99
4. Tabulasi Peneliti.....	102
5. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Penelitian.....	111
6. Statistik Deskriptif, Uji Asumsi Klasik, Adjusted R Square dan Analisis Regresi Berganda.....	114
7. Surat Izin Penelitian	117

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia memiliki kewajiban untuk secara terus-menerus berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan perubahan paradigma pemerintahan yang mendasar dari sistem lama yang serba sentralistik, di mana pemerintah pusat sangat kuat dalam menentukan kebijakan. Paradigma baru yang menuntun reformasi total tersebut menuntut suatu sistem yang mampu menghilangkan ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.

Salah satu unsur reformasi total itu adalah tuntutan pemberian otonomi yang luas kepada daerah kabupaten dan kota, seperti yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Daerah. Otonomi daerah adalah pemberian hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya yang merupakan limpahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Pemberlakuan otonomi daerah merupakan salah satu bentuk perwujudan dari reformasi keuangan negara dan daerah.

Seiring dengan reformasi di bidang keuangan Negara, maka perlu dilakukan perubahan di berbagai bidang untuk mendukung agar reformasi di bidang keuangan Negara dapat berjalan dengan baik. Salah satu perubahan yang signifikan adalah perubahan di bidang akuntansi pemerintah, karena melalui proses akuntansi dihasilkan informasi keuangan yang tersedia bagi berbagai pihak untuk digunakan sesuai dengan tujuan masing-masing. Penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, sesungguhnya adalah dalam rangka peningkatan kualitas laporan tersebut, sehingga laporan keuangan tersebut andal dan terwujudnya akuntabilitas dan transparansi.

Begitu banyak pihak yang akan mengandalkan informasi dalam laporan keuangan yang dipublikasikan oleh Pemerintah Daerah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Mardiasmo (2002) mengidentifikasi sepuluh pemakai laporan keuangan pemerintah, yaitu: (1) pembayar pajak (*tax payer*), (2) pemberi dana bantuan (*grantors*), (3) investor, (4) pengguna jasa (*fee-paying service recipients*), (5) karyawan/ pegawai, (6) pemasok (*vendor*), (7) dewan legislative, (8) manajemen, (9) Pemilih (*voters*), (10) badan pengawas (*oversigh bodies*). Oleh karena itu, informasi harus bermanfaat bagi para pemakai.

Sebagaimana disebutkan dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003, laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam mewujudkan akuntabilitas dan

transparansi pengelolaan keuangan daerah yang harus disampaikan tepat waktu, dan disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam struktur pemerintahan daerah, SKPD merupakan entitas akuntansi yang wajib melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi yang terjadi dilingkungannya meliputi, pendapatan, belanja, aset, dan selain kas. Pembuatan laporan keuangan dilakukan oleh masing-masing SKPD. Selanjutnya, laporan keuangan tersebut akan dikonsolidasikan oleh PPKD menjadi laporan keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Dedi, 2010).

Dalam penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah, diperlukan suatu sistem yang mengatur proses pengklasifikasian, pengukuran, dan pengungkapan seluruh transaksi keuangan yang disebut dengan sistem akuntansi. Untuk menghasilkan informasi keuangan yang bermanfaat bagi para pemakai, maka laporan keuangan harus disusun oleh personel yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi.

Menurut Suwardjono (2005) informasi harus bermanfaat bagi para pemakai, sama saja dengan mengatakan bahwa informasi harus mempunyai nilai. Informasi akan bermanfaat kalau informasi tersebut berpaut dengan keputusan yang menjadi sasaran informasi. Informasi akan bermanfaat kalau informasi tersebut dipahami dan digunakan oleh pemakai. Informasi juga akan bermanfaat kalau pemakai mempercayai informasi tersebut.

Informasi yang bernilai ialah informasi yang memenuhi karakteristik kualitatif, dimana menurut PP nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintah terdapat empat karakter kualitatif, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dapat dipahami. Relevan ialah dimana informasi yang termuat dapat mempengaruhi pengguna dalam pengambilan keputusan. Andal ialah informasi yang terdapat dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang material.

Hal pertama yang memiliki pengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah pengawasan keuangan daerah. Untuk menyajikan informasi keuangan yang handal kepada para pemakai agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan, diperlukan media tertentu yang dipandang relevan, yaitu pengawasan keuangan daerah (Tuasikal, 2007). Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada pengawasan internal, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat. Bagaimanapun inspektorat sebagai pengawas yang diharapkan dapat mendeteksi ketidaksesuaian secara dini.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan keuangan daerah terkait dengan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pengelolaan keuangan pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pada semua hak dan kewajiban daerah dalam kerangka penyelenggaraan

pemerintahan yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Padang.

Sistem akan berjalan baik apabila ada pengawasan yang memastikan sistem berjalan sesuai dengan rencana, untuk mendukung kualitas laporan keuangan yang baik. Maka oleh sebab itu perlu adanya suatu pengawasan dalam pengelolaan anggaran daerah tersebut agar semua proses berjalan dengan baik sehingga dapat menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik (Mardiasmo, 2001). Apabila pengawasan telah dilakukan dengan baik, pengelolaan keuangan daerah akan berjalan sesuai rencana dan dapat menghasilkan kinerja keuangan yang baik yang akan terlihat pada nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Untuk mewujudkan integrasi kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka pembinaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah harus dilakukan secara terus-menerus. Disamping itu, diperlukan perubahan pola pikir (*mind set*) Aparat Pengawas Intern Pemerintah sebagai pemberi peringatan dini (*early warning*) terhadap temuan pelanggaran atau penyimpangan yang berindikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hasil penelitian Fikri (2011) ditemukan lemahnya pengawasan dan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah Kota Padang sehingga mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian.

Hal kedua yang mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah adalah pemanfaatan teknologi informasi. Seperti kita ketahui bahwa total volume Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/D) menunjukkan peningkatan yang luar biasa. Dari sisi akuntansi hal tersebut menunjukkan bahwa volume transaksi keuangan pemerintah juga menunjukkan kuantitas yang semakin besar dan kualitas yang semakin rumit dan kompleks.

Menurut Sugijanto (2002), peningkatan volume transaksi yang semakin besar dan semakin kompleks tentu harus diikuti dengan peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan pemerintah. Untuk itu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayan publik.

Kewajiban Pemanfaatan Teknologi Informasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang sistem Informasi Keuangan Daerah yang merupakan pengganti dari PP No.11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah. Berkaitan dengan pemanfaatan kemajuan teknologi di lingkungan pemerintah daerah, Pelaksana tugas (Plt) Sekertaris Daerah Provinsi Sumatra Barat, Asrul Syukur menjelaskan bahwa setiap pejabat harus bisa menggunakan teknologi, para pejabat dalam menjalankan tugasnya diharapkan menguasai teknologi informasi sehingga

berbagai tugas dapat dijalankan dengan baik seperti komputer (*Singgalang, 30 Januari 2009*).

Informasi yang tepat waktu yang merupakan bagian dari nilai informasi dapat dicapai dengan peran komponen teknologi (Jogiyanto dalam Harifan 2009). Menurut Jogiyanto dalam Harifan (2009) informasi adalah merupakan produk dari sistem teknologi informasi. Teknologi Informasi berperan dalam menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para pengambil keputusan didalam organisasi termasuk dalam hal pelaporan sehingga mendukung proses pengambilan keputusan dengan lebih efektif.

Suatu teknologi informasi terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, manajemen data, dan jaringan (Widjajanto, 2001). Walaupun secara umum telah banyak diketahui manfaat yang ditawarkan oleh suatu teknologi informasi antara lain kecepatan pemrosesan transaksi dan penyiapan pelaporan, keakuratan perhitungan, penyimpanan data dalam jumlah besar, kos pemrosesan yang lebih rendah, kemampuan *multiprocessing*, namun pengimplementasian teknologi informasi tidaklah mudah. Terlebih jika teknologi informasi yang ada tidak atau belum mampu dimanfaatkan secara maksimal maka implementasi teknologi menjadi sia-sia dan semakin mahal.

Kendala penerapan teknologi informasi antara lain berkaitan dengan kondisi perangkat keras, perangkat lunak yang digunakan, pemutakhiran data, kondisi sumber daya manusia yang ada, dan keterbatasan dana. Kendala ini yang mungkin menjadi faktor pemanfaatan teknologi di instansi pemerintah belum

optimal. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi ini mungkin juga memiliki pengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah.

Pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Padang, pemahaman staf terhadap pemanfaatan teknologi informasi sudah baik karena adanya pelatihan-pelatihan dalam mengaplikasi *software* yaitu Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang terhubung secara *online* pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKA) Kota Padang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Namun, terkendala dengan jaringan yang masih sering lama dalam *loading* dan masih ada beberapa kekurangan dalam sistem yang ada.

Penelitian yang dilakukan oleh Zetra (2009) terhadap sepuluh SKPD di Sumatera Barat tahun 2008 dan 2009, ditemukan bahwa pemahaman staf terhadap pemanfaatan teknologi dan kesiapan sarana dan prasarana pendukung seperti komputer, baik *hardware* maupun *software* dalam penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah masih kurang. Padahal untuk dapat terlaksananya pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, harus didukung oleh teknologi yang memadai.

Fenomena pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Ketua BPK RI Anwar Nasution menilai laporan keuangan pemerintah masih banyak disajikan data-data yang tidak sesuai dan mengakibatkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tidak layak audit. Permasalahan yang ditemukan diantaranya terkait sangat

rendahnya akuntabilitas dan transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, ketidakjelasan penyimpanan dana daerah dan penggunaan keuangan daerah yang tidak jelas keperluannya. (Media Indonesia, 2006)

Salah satu cara bagaimana melihat apakah laporan keuangan yang telah disusun telah sesuai standar akuntansi pemerintah dan telah sesuai dengan kualitas yang diharapkan, dapat dilihat dari opini auditor. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2008 Kota Padang, BPK RI perwakilan Sumatera Barat memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), itu berarti peningkatan dari pemberian opini atas LKPD tahun 2007 yaitu *disclaimer*. Sedangkan pada tahun 2009 dan 2010 opini audit LKPD kota Padang tetap Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Pemberian opini tersebut tidak terlepas dari beberapa hal yang mempengaruhinya antara lain masih belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi yang digunakan dalam penyampaian LKPD, lemahnya pengawasan sehingga ada ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan keterlambatan penyampaian laporan keuangan dan jumlah sumber daya manusia terkait dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan. Salah satu upaya konkritnya adalah penyampaian laporan keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan sesuai standar akuntansi pemerintahan (<http://padang.bpk.go.id/>).

Adapun penelitian yang terkait dengan penelitian ini, telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Indriasari (2008) meneliti tentang Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan sistem

Pengendalian Intern terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Studi empiris pada Pemko Palembang dan Kab Ogan Ilir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Selanjutnya Winidyaningrum (2010), yang meneliti tentang Pengaruh SDM dan Pemanfaatan TI terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemda dengan variabel intervening Pengendalian Intern Akuntansi studi empiris pada Pemda Subosuka Wono Sraten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemanfaatan TI berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemda. Dari penelitian tersebut, maka penulis ingin melakukan penelitian ulang kepada variabel Nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui sejauhmana nilai informasi pelaporan keuangan yang dihasilkan oleh Pemerintah Kota Padang. Alasan peneliti mengambil tempat penelitian di Kota Padang karena adanya masalah terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah Kota Padang yaitu opini WDP yang diberikan oleh BPK atas pemeriksaan LKPD Kota padang tiga tahun berturut-turut, di mana Kota Padang yang merupakan Ibu Kota Provinsi menggunakan anggaran yang lebih besar dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya. Perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus penelitian yaitu pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh inspektora dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap nilai informasi laporan keuangan, dimana peneliti

mengambil studi empiris berbeda yaitu pada masing-masing SKPD yang terdapat di Kota Padang.

Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengawasan keuangan daerah dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah kota Padang yang berjudul **“Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kota Padang)”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas masalah yang dapat diidentifikasi adalah;

1. Sejauhmana penyusunan laporan keuangan pada Pemerintah Kota Padang?
2. Seberapa besar pengaruh pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi pelaporan keuangan Pemerintah Kota Padang?
3. Seberapa besar pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan Pemerintah Kota Padang?

C. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas, yaitu pengawasan keuangan daerah dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan Pemerintah Kota Padang.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi pelaporan keuangan Pemerintah Kota Padang?
2. Seberapa besar pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan Pemerintah Kota Padang?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Pengaruh pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi pelaporan keuangan Pemerintah Kota Padang.
2. Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan Pemerintah Kota Padang.

F. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada:

1. Penulis, untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis sehubungan dengan akuntansi di pemerintahan.
2. Pemerintah Kota Padang, dapat menjadi masukan dalam peningkatan kualitas nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.
3. Akademisi, menambah suatu bukti empiris dan ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi sektor publik.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. KAJIAN TEORI

1. Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

a. Pelaporan Keuangan Pemerintah

Pelaporan keuangan adalah struktur dan proses akuntansi yang menggambarkan bagaimana informasi keuangan disediakan dan dilaporkan untuk mencapai tujuan ekonomik dan sosial negara (Suwardjono, 2005). Laporan Keuangan merupakan bentuk pertanggung jawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan Keuangan yang diterbitkan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lain.

Laporan keuangan pada dasarnya merupakan asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menginformasikan kepada pihak lain, yaitu para pemangku kepentingan (*stake holder*), tentang kondisi keuangan pemerintah. Di Indonesia, laporan keuangan pokok yang harus dibuat oleh pemerintah sebagai tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan meliputi :1) Laporan Realisasi Anggaran, 2) Neraca, 3) Laporan Arus Kas, dan 4) Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya- upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan (PP No. 71 Tahun 2010) :

1) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2) Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan, sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

3) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4) Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Menurut Anggraini (2002) dalam Harifan (2009) apabila aktivitas dana suatu pemerintah untuk suatu periode pelaporan telah dicatat, maka data perlu diikhtisarkan untuk tujuan :

- 1) Pelaporan bahwa aktifitas telah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.
- 2) Pelaporan posisi keuangan kesatuan pemerintah pada akhir periode pelaporan
- 3) Pelaporan perubahan (misalnya penghasilan dan pengeluaran) sumber yang digunakan.

Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan daerah pemerintah provinsi/Kabupaten/Kota terdiri dari (Taufik dalam Harfan 2009) :

1) Pendahuluan

Tujuan kebijakan akuntansi adalah mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

2) Peranan dan tujuan pelaporan keuangan

a) Peranan pelaporan keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh instansi pemerintah daerah selama satu periode laporan.

b) Tujuan Pelaporan keuangan

- (1) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- (2) Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- (4) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- (5) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
- (6) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan,

sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

c) Dasar hukum pelaporan keuangan

Menurut Mardiasmo (2002) tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik sebagai berikut:

1) Kepatuhan dan Pengelolaan (*Compliance and Stewardship*)

Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah ditetapkan.

2) Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif (*Accountability and Retrospective Reporting*)

Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.

3) Perencanaan dan Informasi Otorisasi (*Planning and Authorization Information*)

Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas di masa yang akan datang. Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana.

4) Kelangsungan Organisasi (*Viability*)

Laporan keuangan berfungsi untuk membantu pengguna dalam menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan menyediakan barang dan jasa (pelayanan) di masa yang akan datang.

5) Hubungan Masyarakat (*Public Relation*)

Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai kepada pengguna yang dipengaruhi karyawan dan masyarakat. Laporan keuangan berfungsi sebagai alat komunikasi dengan publik dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

6) Sumber Fakta dan Gambaran (*Source of Facts and Figures*)

Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada berbagai kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih dalam.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh instansi pemerintah daerah selama satu periode laporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan keuangan pemerintah daerah menyajikan informasi bagi para pengguna laporan keuangan dalam menilai akuntabilitas dan

membuat keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh berbagai pihak. Pihak yang terlibat dan berkepentingan terhadap Pemerintah daerah baik itu langsung maupun tidak langsung yang disebut sebagai pemakai laporan keuangan daerah yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pengawas Keuangan, rakyat, pemerintah pusat, dan donatur.

b. Nilai Informasi

Menurut Suwardjono (2005) nilai informasi adalah kemampuan informasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keyakinan pemakai dalam pengambilan keputusan. Agar manfaat dan tujuan penyajian laporan keuangan pemerintah dapat dipenuhi maka informasi yang disajikan harus merupakan informasi yang bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Informasi akan bermanfaat kalau informasi dapat dipahami dan digunakan oleh para pemakai, serta informasi juga bermanfaat kalau pemakai mempercayai informasi tersebut.

Menurut Wahyono (2004) dalam menghasilkan suatu nilai informasi yang bernilai disini menyangkut dua elemen pokok, yaitu informasi yang dihasilkan dan sumber daya yang menghasilkan. Menyangkut informasi yang dihasilkan, maka informasi laporan keuangan tersebut harus dibuat sedemikian rupa sehingga tidak terlalu rumit bagi pemakai dan bernilai, dengan tidak menggunakan istilah-istilah yang kabur serta menggunakan klasifikasi peraturan yang lazim atau berlaku.

Menurut Suwardjono (2005), suatu informasi dikatakan mempunyai nilai bila dapat digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pemakainya. Kebermanfaatan ini merupakan suatu karakteristik yang hanya dapat ditentukan secara kualitatif dalam hubungannya dengan keputusan, pemakai, dan keyakinan pemakai terhadap informasi. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yang merupakan prasyarat normatif sebagaimana disebutkan dalam Rerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) antara lain :

1) Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan, apakah informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

Informasi yang relevan:

a) Memiliki manfaat umpan balik (*Feedback Value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi di masa lalu.

b) Memiliki manfaat prediktif (*Predictive Value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

c) Tepat Waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

d) Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi dapat dicegah.

2) Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

a) Penyajian Jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b) Dapat Diverifikasi (*Verifiability*)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang

berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

c) Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3) Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4) Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Suatu informasi harus bermanfaat bagi para pemakasi, sama saja dengan mengatakan bahwa informasi harus mempunyai nilai. Unsur-unsur pembentukan kualitas informasi menurut suwardjono (2005) adalah sebagai berikut:

1) Keterpahaman

Keterpahaman adalah kemampuan informasi untuk dapat dicerna maknanya oleh pemakai.

2) Keberpautan

Keberpautan atau kerelevanan adalah kemampuan informasi untuk membantu pemakai dalam membedakan beberapa alternatif keputusan sehingga pemakai dapat dengan mudah menentukan pilihan.

3) Nilai Prediktif

Sebagai unsur keberpautan, nilai prediktif adalah kemampuan informasi untuk membantu pemakai dalam peningkatan probabilitas bahwa harapan-harapan pemakai akan memunculkan suatu kejadian masa lalu atau yang akan terjadi. Nilai prediksi disini adalah jenis dan sifat informasi yang menjadi masukan dalam proses prediktif.

4) Nilai Balikan

Nilai Balikan adalah kemampuan informasi untuk dijadikan basis mengevaluasi apakah keputusan-keputusan masa lalu adalah tepat dengan datangnya informasi tersebut.

5) Ketepatanwaktuan

Ketepatanwaktuan adalah tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi keputusan.

6) Keterandalan

Keterandalan adalah kemampuan informasi untuk memberi keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid. Informasi akan menjadi berkurang nilainya kalau orang yang menggunakan informasi meragukan kebenaran atau validitas informasi tersebut.

7) Ketepatan Penyimbolan

Ketepatan penyimbolan adalah kesesuaian atau kecocokan antara pengukur atau deskripsi (representasi) dan fenomena yang diukur atau dideskripsikan. Dalam akuntansi, fenomena yang ingin direpresentasikan adalah kondisi fisis, kondisi keuangan, dan kegiatan ekonomik badan usaha berupa sumber ekonomik, kewajiban keuangan, dan transaksi atau kejadian yang mengubah sumber ekonomik dan kewajiban tersebut.

8) Keterujian

Keterujian adalah kemampuan informasi untuk memberikan keyakinan yang tinggi kepada para pemakai karena tersedianya sarana bagi para pemakai untuk menguji secara independen ketepatan penyimbolan (kebenaran/validitas informasi). Dengan kata lain pengukuran yang dipilih telah diaplikasikan tanpa kesalahan atau bias.

9) Kenetralan

Kenetralan adalah ketidak berpihakan pada grup tertentu atau ketidakbiasan dalam perlakuan akuntansi. Ketidakberbiasan berarti bahwa informasi disajikan tidak untuk mengarahkan grup tertentu agar bertindak sesuai dengan keinginan penyedia informasi.

10) Keterbandingan

Keterbandingan adalah kemampuan informasi untuk membantu pemakai mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara dua perangkat fenomena ekonomik.

11) Materialitas

Materialitas adalah besar kecilnya atau penghilangan atau penyalahsajian informasi akuntansi yang menjadikan besar kemungkinan bahwa pertimbangan seseorang bijaksana yang mengandalkan diri pada informasi tersebut berudah atau terpengaruh oleh penghilangan/pengabaian atau penyalahsajian.

2. Pengawasan Keuangan Daerah

a. Pengertian

Pengawasan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pasal 1 (satu) menyebutkan, bahwa pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan menurut Yosa

(2010) dalam Arfianti (2011) yang dimaksud dengan pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber data organisasi atau pemerintahan telah digunakan secara efektif dan efisien mungkin guna mencapai tujuan organisasi atau pemerintahan.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan, diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan, sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan, dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Dalam kaitannya dengan akuntabilitas publik, pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern (*internal control*) maupun pengawasan ekstern (*external control*).

b. Jenis-jenis Pengawasan

Jenis-jenis pengawasan dapat dibedakan berdasarkan objek, sifat, ruang lingkup, dan metode pengawasannya. (Baswir, 2000)

- 1) Pengawasan berdasarkan objek
 - a) Pengawasan terhadap penerimaan Negara
 - b) Pengawasan terhadap pengeluaran Negara
- 2) Pengawasan menurut sifatnya
 - a) Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum dimulainya pelaksanaan suatu kegiatan, atau sebelum terjadinya pengeluaran keuangan. Pengawasan preventif pada dasarnya dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan
 - b) Pengawasan detektif adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan dengan meneliti dan mengevaluasi dokumen-dokumen laporan pertanggungjawaban bendaharawan. Pengawasan detektif biasanya dilaksanakan setelah dilakukannya tindakan yaitu dengan membandingkan antara hal yang telah terjadi dengan hal yang seharusnya terjadi.
- 3) Pengawasan menurut ruang lingkupnya
 - a) Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang berasal dari lingkungan internal organisasi pemerintah. Tujuan pengawasan ini tidak hanya melakukan verifikasi, melainkan juga dimaksudkan untuk

membantu pihak yang diawasi dalam menunaikan tugasnya secara lebih baik.

- b) Pengawasan eksternal adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh suatu unit pengawasan yang sama sekali berasal dari luar lingkungan organisasi eksekutif. Dengan demikian, dalam pengawasan eksternal ini, antara pengawas dengan pihak yang diawasi tidak lagi terdapat hubungan kedinasan.

4) Pengawasan menurut metode pengawasannya

- a) Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan atau atasan langsung suatu organisasi atau unit kerja terhadap bawahan.
- b) Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional, baik yang berasal dari lingkungan internal pemerintah maupun yang berasal dari lingkungan eksternal pemerintah.

c. Tujuan Pengawasan keuangan daerah

Pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun dapat berjalan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Pengawasan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar

pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Alamsyah (1997) dalam Fikri (2011) menyebutkan bahwa tujuan adanya pengawasan APBD adalah untuk:

- 1) menjaga agar anggaran yang disusun benar-benar dijalankan,
- 2) menjaga agar pelaksanaan APBD sesuai dengan anggaran yang telah digariskan, dan
- 3) menjaga agar pelaksanaan APBD benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 2009 inspektorat bertugas untuk menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai Unit/Satuan Kerja sebagai bagian yang integral dalam organisasi Pemerintah Daerah.

d. Pengawasan keuangan daerah

Pengawasan merupakan tahap integral dengan keseluruhan tahap pada penyusunan dan pelaporan APBD. Pengawasan diperlukan pada setiap tahap bukan hanya pada tahap evaluasi saja (Mardiasmo, 2002). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pengawas Intern Pemerintahan Daerah dilakukan oleh Inspektorat yang mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan

urusan pemerintahan desa. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Inspektorat mempunyai fungsi :

- 1) Perencanaan program pengawasan
- 2) Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan
- 3) Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2007 yang direvisi menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang termasuk dalam ruang lingkup pengawasan pengelolaan keuangan daerah ialah:

- 1) Pengaturan dan penetapan
 - a) Terdapat peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.
 - b) Pengaturan dan penetapan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
 - c) Sistem pengendalian intern atas pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan di SKPD yang diawas
- 2) Perencanaan dan penganggaran
 - a) APBD telah disusun dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan pedoman lainnya yang berlaku termasuk hasil evaluasi atas rancangan Perda tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD.

- b) RKA-SKPD telah disusun berdasarkan efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut
- 3) Pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah
 - a) Dokumen pelaksanaan anggaran SKPD telah disusun secara rinci
 - b) Penerimaan dan pengeluaran daerah dilakukan melalui rekening kas umum
 - c) Perubahan APBD dilakukan sesuai kriteria/persyaratan dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- 4) Pertanggungjawaban keuangan daerah
 - a) Bukti bendahara penerima dan bendahara pengeluaran daerah
 - b) Penyelenggaraan akuntansi oleh SKPD dan SKPKD telah sesuai dengan sistem dan prosedur akuntansi yang ditetapkan
 - c) Laporan SKPD terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan.
- 5) Pendapatan dan belanja daerah
 - a) Pendapatan Asli Daerah
 - (1) Pajak dan retribusi daerah
 - (2) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - b) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
 - (1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
 - (2) Jasa giro
 - (3) Pendapatan bunga
 - (4) Tuntutan ganti rugi

- c) Dana Perimbangan
 - (1) Bagi hasil pajak dan sumber daya alam
 - (2) Dana alokasi umum
 - (3) Dana alokasi khusus
 - (4) Hibah
 - (5) Dana darurat
- d) Belanja Daerah
 - (1) Belanja pegawai
 - (2) Belanja operasi
 - (3) Belanja modal
 - (4) Belanja pembiayaan
 - (5) Subsidi
 - (6) Hibah
- e) Bantuan Sosial
- f) Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan
- g) Belanja tidak terduga
- h) Pembiayaan
 - (1) Penerimaan
 - (2) Pengeluaran

Pada hakekatnya, mekanisme pengawasan keuangan daerah dapat dibedakan atas dua hal yaitu pengawasan intern dan pengawasan ekstern. Biasanya pengawasan intern meliputi pengawasan *supervisi (built in control)*, pengawasan *birokrasi* serta pengawasan melalui lembaga-lembaga

pengawasan intern. Pada pengawasan supervisi (pengawasan atasan terhadap bawahan) masing-masing pimpinan setiap unit diwajibkan melakukan pengawasan keuangan daerah terhadap para bawahan yang menjadi tanggungjawabnya.

Adanya pengawasan yang dilakukan secara *bertingkat* ini, diharapkan adanya penyimpangan dari kebijakan (ketentuan) yang telah ditetapkan, dapat diketahui sedini mungkin (*early warning system*). Adapun pengawasan birokrasi yaitu pengawasan melalui sistem dan prosedur administrasi. Perlu diketahui bahwa negara kita masih menggunakan sistem anggaran garis (*line budgeting system*) atau disebut sistem anggaran tradisional. Sistem ini hanya menitik beratkan pada segi pelaksanaan dan pengawasan anggaran.

Dari segi pelaksanaan yang dipentingkan adalah *kesesuaian* (*compliance*) antara besarnya hak dengan obyek pengeluaran dari tiap-tiap Departemen atau lembaga. Sedangkan dari segi pengawasan yang dipentingkan adalah *kesahihan* (*validitas*) bukti-bukti transaksi atas pembelanjaan anggaran tersebut. Sistem pembukuan yang berlaku di negara kita masih menggunakan sistem administrasi kas yaitu menerapkan tata buku tunggal (*single entry bookkeeping*) berdasarkan metode dasar tunai (*cash basis*). Oleh karena itu yang langsung dapat diketahui adalah masalah transaksi kas atau penerimaan dan pengeluaran kas saja, sehingga untuk mengetahui prestasi (*kinerja*) yang dicapai dibalik hasil transaksi kas tersebut diperlukan *analisis* lebih lanjut. Hal ini untuk mengetahui apakah

transaksi kas tersebut telah efisien dan efektif sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

3. Pemanfaatan Teknologi Informasi

a. Teknologi

Menurut Jogiyanto dalam Harifan (2009) Teknologi merupakan alat yang digunakan individual dalam penyelesaian tugas mereka, dalam konteks sistem informasi, teknologi terkait dengan sistem komputer(perangkat keras, perangkat lunak, data) dan penggunaan jasa pendukung (training, misalnya) yang memberikan panduan penggunaan dalam menyelesaikan tugas.

Komputer telah menggantikan teknologi manual dengan melakukan pemrosesan atas data yang jumlahnya sangat besar, ataupun menjalankan pekerjaan yang sangat kompleks. Komputer juga dapat bekerja sangat konsisten seerta reliabel (dapat dipercaya) dalam waktu yang lebih cepat bila dibanding dengan kemampuan manusia.

b. Informasi

Menurut Jogiyanto dalam Harifan (2009) Informasi merupakan data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. sedangkan menurut Davis dalam Harifan (2009) informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam mengambil keputusan saat ini atau mendatang.

Informasi merupakan suatu fakta, data, pengamatan, persepsi, atau sesuatu yang lain, yang menambah pengetahuan. Berdasarkan beberapa pendapat diatas disimpulkan bahwa informasi meliputi unsur-unsur data, pengelolaan data menambah pengetahuan dan dasar pembuatan keputusan saat sekarang atau masa yang akan datang.

c. Teknologi Informasi

Teknologi Informasi adalah suatu teknologi yang menitikberatkan penggunaan komputer dan teknologi yang berhubungan dengan pengaturan sumber informasi (Nugroho, 2001).

Teknologi informasi meliputi komputer (*mainframe, mini, micro*), perangkat lunak (*software*), *database*, jaringan (*internet, intranet*), *electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Wilkinson *et al.*, 2000 dalam Arfianti, 2011). Pemanfaatan teknologi informasi mencakup adanya (Hamzah, 2009 dalam Winidyaningrum, 2010) :

- 1) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik, dan
- 2) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat.

Teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer (*hardware* dan *software*) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. Komputer sebagai salah satu komponen dari teknologi informasi

merupakan alat yang bisa melipatgandakan kemampuan yang dimiliki manusia dan komputer juga bisa mengerjakan sesuatu yang manusia mungkin tidak mampu melakukannya. Pengolahan data menjadi suatu informasi dengan bantuan komputer jelas akan lebih meningkatkan nilai dari informasi yang dihasilkan (Wahana Komputer, 2003). Dalam hubungannya dengan sistem informasi akuntansi, komputer akan meningkatkan kapabilitas sistem. Ketika komputer dan komponen-komponen yang berhubungan dengan teknologi informasi diintegrasikan ke dalam suatu sistem informasi akuntansi, tidak ada aktivitas umum yang ditambah atau dikurangi.

d. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Menurut jurnali dan supomo (2002) pemanfaatan teknologi adalah tingkat integritasi teknologi informasi pada pelaksanaan tugas-tugas akuntansi. Pemanfaatan tingkat integrasi teknologi informasi pada pelaksanaan tugas-tugas akuntansi terdiri dari:

- 1) Bagian akuntansi/keuangan memiliki computer yang cukup untuk melaksanakan tugas.
- 2) Jaringan internet telah terpasang di unit kerja.
- 3) Jaringan computer telah dimanfaatkan sebagai penghubung antar unit kerja dalam pengiriman data dan informasi yang dibutuhkan.
- 4) Proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan dilakukan secara komputerisasi.

- 5) Pengolaan data transaksi keuangan menggunakan *software* yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 6) Laporan akuntansi dan manajemen dihasilkan dari system informasi yang terintegrasi.
- 7) Adanya jadwal pemeliharaan peralatan secara teratur.
- 8) Peralatan yang usang/rusak didata dan diperbaiki tepat pada waktunya.

Menyangkut pemanfaatan teknologi dalam menghasilkan nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah, hal ini didasarkan kepada semakin meningkatnya total volume APBN/ D dari tahun ketahun. Dari sisi akuntansi hal tersebut menunjukkan bahwa volume transaksi keuangan pemerintah juga menunjukkan kuantitas yang semakin besar dan kualitas yang semakin kompleks dan rumit.

Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No.56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang merupakan pengganti dari PP No. 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah. Sedangkan menurut Widjajanto (2001) secara umum manfaat yang ditawarkan oleh suatu teknologi informasi antara lain kecepatan pemrosesan transaksi dan membantu dalam penyiapan laporan.

Sistem informasi akuntansi masih mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data. Sistem masih memasukkan pengendalian-pengendalian atas keakuratan data. Sistem juga menghasilkan laporan-laporan dan informasi lainnya. Hanya saja pengkomputerisasian sistem

informasi akuntansi seringkali mengubah karakter aktivitas. Data mungkin dikumpulkan dengan peralatan khusus. Catatan akuntansi menggunakan lebih sedikit kertas. Kebanyakan, jika tidak semuanya, tahapan-tahapan pemrosesan dilakukan secara otomatis. Output lebih rapi, dalam bentuk yang lebih bervariasi, dan lebih banyak.

Yang lebih penting dari semua perubahan ini adalah peningkatan dalam hal (Wilkinson *et al.*, 2000 dalam Arfianti, 2011):

- 1) pemrosesan transaksi dan data lainnya lebih cepat,
- 2) keakurasian dalam perhitungan dan perbandingan lebih besar,
- 3) kos pemrosesan masing-masing transaksi lebih rendah,
- 4) penyiapan laporan dan *output* lainnya lebih tepat waktu,
- 5) tempat penyimpanan data lebih ringkas dengan aksesibilitas lebih tinggi ketika dibutuhkan,
- 6) pilihan pemasukan data dan penyediaan *output* lebih luas/banyak, dan
- 7) produktivitas lebih tinggi bagi karyawan dan manager yang belajar untuk menggunakan komputer secara efektif dalam tanggung jawab rutin dan pembuatan keputusan.

Sedangkan kelemahannya, sistem komputer cenderung kurang fleksibel dan tidak dapat cepat beradaptasi jika ada perubahan sistem, perencanaan dan pembuatan sistem terkomputerisasi memakan waktu lebih lama, biaya pemasangan instalasi tinggi, butuh kontrol yang lebih baik, jika ada bagian *hardware* yang tidak bekerja dapat melumpuhkan sistem, komputer tidak dapat mendeteksi penyebab kesalahan, hilangnya

jejak audit, komputer peka terhadap pengaruh lingkungan, data yang disimpan mudah rusak.

4. Penelitian Relevan

Indriasari (2008) meneliti tentang Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan sistem Pengendalian Intern terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Studi empiris pada Pemko Palembang dan Kab Ogan Ilir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Harifan (2009) yang meneliti mengenai Pengaruh Kapasitas Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Nilai informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Kota Padang. dari Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kapasitas Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi berpengaruh signifikan positif terhadap Nilai Informasi (Keterpahaman) Pelaporan Keuangan Pemerintah Kota Padang.

Penelitian oleh Winidyaningrum (2010), yang meneliti tentang Pengaruh SDM dan Pemanfaatan TI terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemda dengan variabel intervening Pengendalian Intern Akuntansi studi empiris pada Pemda Subosuka Wono Sragen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemanfaatan TI berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemda.

Arfianti (2011) meneliti tentang faktor yang mempengaruhi nilai informasi laporan keuangan pemerintah studi empiris pada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Batang, Faktor-faktor yang diteliti antara lain kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern, dan pengawasan keuangan daerah. hasil pengujian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan pengawasan keuangan daerah tidak berpengaruh.

B. HUBUNGAN ANTAR VARIABEL

1. Hubungan Pengawasan Keuangan Daerah dengan Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah

Sifat dan isi laporan keuangan dipengaruhi oleh mekanisme pengawasan dan pelaksanaannya. Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 2009 pengawasan intern bertugas untuk menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai unit/ satuan kerja sebagai bagian yang integral dalam organisasi pemerintah daerah. untuk menentukan keandalan informasi keuangan yang dihasilkan.

Pengawasan keuangan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar keuangan pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan diarahkan antara lain untuk mendapatkan keyakinan yang wajar terhadap efektivitas dan efisiensi organisasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Salah satu

fungsi pengawasan adalah pengambilan tindakan korektif, yaitu apabila ditemukan adanya penyimpangan, kekeliruan, serta pemborosan dapat segera diperbaiki, sehingga informasi keuangan yang dihasilkan menjadi valid dan relevan.

Pengawasan merupakan upaya untuk mengenali penyimpangan atau hambatan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Bila ternyata kemudian ditemukan adanya penyimpangan atau hambatan, diharapkan akan dapat segera dideteksi atau diambil tindakan koreksi, sehingga informasi keuangan dapat segera digunakan oleh pemakai, dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah dapat berjalan secara maksimal. Di dalam prosedur pengawasan, mencakup pula mengenai batas waktu penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga dengan adanya pengawasan yang baik, maka laporan keuangan pemerintah daerah dapat disampaikan dengan tepat waktu. Pengawasan keuangan daerah Pemerintah terkait dengan laporan keuangan merupakan suatu proses yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai atas keandalan laporan keuangan. Jadi semakin baik pengawasan keuangan daerah pemerintah akan semakin baik pula nilai informasi pelaporan keuangan daerahnya.

Berdasarkan uraian maka dapat diajukan hipotesis : Pengawasan Keuangan daerah berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah, sesuai dengan yang akan diuji pada hipotesis 1.

2. Hubungan Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah

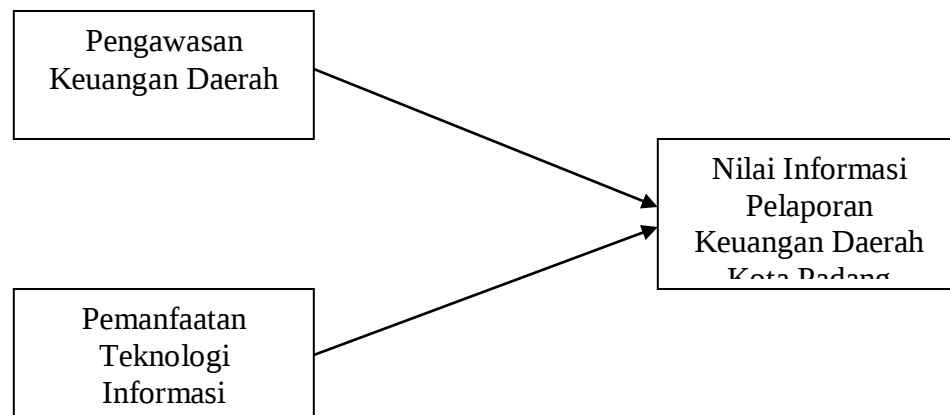
Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan publik. Dengan kemajuan teknologi informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, maka dapat membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola, dan mendayagunakan informasi keuangan daerah secara cepat dan andal.

Manfaat lain yang ditawarkan dalam pemanfaatan teknologi informasi adalah kecepatan dalam pemrosesan informasi. Sistem akuntansi di Pemerintah Daerah sudah pasti memiliki transaksi yang kompleks dan besar volumenya. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi informasi akan sangat membantu mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan, sehingga laporan keuangan tersebut tidak kehilangan nilai informasi. Berdasarkan uraian maka dapat diajukan hipotesis : pemanfaatan teknologi informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah, sesuai dengan yang akan diuji pada hipotesis 2.

C. KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka konseptual dimaksudkan sebagai konsep untuk menjelaskan mengungkapkan keterkaitan antara variabel yang akan diteliti berdasarkan batasan dan rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang dan kajian teori yang telah dikemukakan di atas dapat dijelaskan bahwa untuk meningkatkan nilai informasi pelaporan keuangan daerah , pemanfaatan teknologi informasi haruslah baik, dan Pengawasan keuangan daerah yang memadai di pemerintahan Kota Padang. Suatu laporan keuangan itu berkualitas dan bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dimengerti dan dimanfaatkan bagi para pemakainya dalam pengambilan keputusan.

Untuk lebih menyederhanakan kerangka pemikiran tersebut, maka dibuatkan kerangka konseptual seperti yang terlihat pada gambar:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

D. Hipotesis

Berdasarkan kerangka konseptual di atas maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan Pemerintah Kota Padang

H₂ : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan Pemerintah Kota Padang

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai “Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah studi empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. (H_1 diterima).
2. Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh signifikan positif terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. (H_2 diterima).

B. Keterbatasan

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Dimana dari model penelitian yang digunakan, diketahui bahwa variabel penelitian yang digunakan dapat menjelaskan sebesar 37,50%. sedangkan sisanya 62,50% ditentukan oleh faktor faktor lain yang tidak dimasukan dalam penelitian ini.
2. Penelitian ini merupakan metode survey menggunakan kuesioner tanpa dilengkapi dengan wawancara atau pertanyaan lisan. Sebaiknya dalam mengumpulkan data dilengkapi dengan menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis.

C. Saran

Berdasarkan pada pembahasan dan kesimpulan di atas, maka peneliti menyarankan bahwa:

1. Dari hasil penelitian ini terlihat bahwa pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh inspektorat dan pemanfaatan teknologi informasi oleh SKPD Kota Padang telah baik dilakukan, tapi masih ada beberapa hal yang belum sepenuhnya dilakukan dengan sempurna sehingga hal ini akan berdampak pada nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Pemerintah sebaiknya melakukan *upgrade* terhadap sistem akuntansi pelaporan keuangan daerah sehingga tidak ada hambatan dalam melakukan pencatatan akuntansi secara *online*. Dengan begitu maka akan mempermudah dalam penyajian laporan keuangan yang bernilai.
2. Penelitian ini masih terbatas pada Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan perubahan variabel penelitian untuk menemukan variabel-variabel lain yang berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan daerah.
3. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, yaitu pada metode penelitian yang dipakai. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan berbagai macam metode, seperti wawancara langsung, metode survei lapangan, dll.

4. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas daerah penelitian dan memperbanyak jumlah responden, sehingga penelitian lebih memungkinkan untuk disimpulkan secara umum serta dilakukan perubahan dalam alternatif jawaban.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfianti, Dita. 2011. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada SKPD di Kabupaten Batang. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Badan Pemeriksa Keuangan RI. 2006. Konsep Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
- Baswir, Revrisond. 2000. *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*. Yogyakarta:BPFE
- Fikri, Miftahul. 2011. Pengaruh SIKD dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Studi Empiris Pada SKPD Pemerintah Kota Padang. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
- Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik. 2006. *Standar Akuntansi Pemerintahan: Telaah Kritis PP Nomor 24 Tahun 2004*. Yogyakarta: BPFE
- Harifan, Handriko. 2009. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Akuntansi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Studi Empiris Pada SKPD Pemerintah Kota Padang. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
- Indriasari, Desi. 2008. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal SNA*. Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang
- Kuntadi, Cris. 2008. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. [http://www.google.com/\(14/032012\)](http://www.google.com/(14/032012))
- Kuncoro, Mudrajat. 2003. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga
- Mahmudi. 2007. *Analisis Laporan Keuangan Daerah: Panduan Bagi Eksekutif, DPRD, dan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial, dan Politik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Mardiasmo. 2001. *Pengawasan, Pengendalian & Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- _____. 2002. *Akuntansi Sektor Publik Edisi Pertama*. Yogyakarta: Penerbit Andi

- Sekaran, Uma. 2006. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat
- Sugijanto. 2002. Peranan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Implikasi UU No. 22/25 Tahun 1999. *Lintasan Ekonomi*. Volume XIX Nomor 1. Hal. 50-66
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta
- Suwardjono. 2005. *Teori Akuntansi: Perekayasa Pelaporan Keuangan*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPFE
- Tuasikal, Askam. 2007. Pengaruh Pengawasan, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan dan Pengelolaan Keuangan terhadap Kinerja Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Pada Kabupaten dan Kota di Propinsi Maluku. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*. Vol. 10 No. 1 Hal. 66-82
- Wahana Komputer. 2003. *Panduan Aplikatif Sistem Akuntansi Online Berbasis Komputer*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Wahyono, Teguh. 2004. *Sistem Informasi Akuntansi: Analisis, Desain dan Pemrograman Komputer*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Widjajanto, Nugroho. 2001. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Erlangga Sektor Publik
- Winidyaningrum. 2010. Pengaruh SDM dan Pemanfaatan TI Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemda Dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi. *Jurnal SNA*. STIE ST. Pignatelli: Surakarta
- Yani, Ahmad. 2009. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers
- Zetra, Aidinil. 2009. Strategi Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan daerah. *Skripsi*. Melalui <http://www.google.com> [14/03/2012]

Peraturan dan Undang-Undang

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Melalui <http://www.google.com> [14/03/2012]

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 2009. “Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”.
<http://www.google.com> [14/03/2012]

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Melalui <http://www.google.com> [14/03/2012]

_____, Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Melalui <http://www.google.com> [14/03/2012]

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Melalui <http://www.google.com> [14/03/2012]

_____, Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Melalui <http://www.google.com> [14/03/2012]

_____, Nomor 33 Tahun 2004 Tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Melalui <http://www.google.com> [14/03/2012]